



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2019/Periodik - 2018)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**UNIT KERJA** : BIRO UMUM  
**SUB UNIT KERJA** : BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : LILIK HENRY RISTANTO
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
3. NHK : 224480

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 2.505.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 217 m2/180 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 642.000.000
2. Tanah Seluas 286 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 364.000.000
3. Bangunan Seluas 18.1 m2 di SLEMAN, LAINNYA Rp. 375.000.000
4. Bangunan Seluas 18.1 m2 di SLEMAN, LAINNYA Rp. 375.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/45 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 749.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 77.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA VIOS SEDAN Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. 113.000.000****D. SURAT BERTHARGA** **Rp. 612.510.000****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 429.837.533****F. HARTA LAINNYA** **Rp. 19.930.395****Sub Total** **Rp. 3.757.777.928****III. HUTANG** **Rp. 1.136.539.138****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** **Rp. 2.621.238.790**

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id).



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **5 Maret 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.